

Imperialisme Gaya Baru Terhadap Buruh Industri Garmen di Bangladesh dalam Kerangka Modern World System

Sukma Ayu Putri¹

¹ Staf Pengajar Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat

sukmaayuputri@uniramalang.ac.id

Abstract

Exploitation of labour has been big problems in Bangladesh, its combination between imperialist (thats the US and European Garment Consortium), local factory owners and government. Dependence Bangladesh as a periphery country under fashion companies from core country is the evidence of existing modern world system. This paper discusses about how exploitation and poverty correlate with development failures in Bangladesh. Actually, working in the garment industry are the another way to reach their basic needs, but in fact, they all getting low salary which is under minimum cost of living. Until now, the ready-made garments (RMG) industry of Bangladesh still being "big power" endorser for low skills populations within considerable polemics.

Keywords: *Modern world system, Core, Periphery, Bangladesh*

Abstrak

Bangladesh “terperangkap” dalam skema eksploitasi tenaga kerja dari kombinasi praktek Imperialis pengusaha fashion dunia (Konsorsium Garmen AS dan Eropa) dengan pemilik pabrik dan penguasa. Ketergantungan Bangladesh sebagai negara periphery pada pengusaha fashion sebagai pemain dari negara core merupakan bentuk dari adanya modern world system yang berlaku. Tulisan ini membahas bagaimana eksploitasi, kemiskinan dan kesenjangan berkorelasi dengan gagalnya upaya-upaya pembangunan di Bangladesh. Bekerja pada industri garmen adalah pilihan terakhir para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup meskipun pada kenyataannya upah yang diterima masih dibawah biaya hidup minimal yang ditetapkan. Industri garmen Bangladesh adalah “kekuatan besar” penopang ekonomi penduduk berkeahlian rendah (low-skill) yang didalamnya mempunyai segudang polemik.

Kata-kata kunci: *Modern world system, Core, Periphery, Bangladesh*

Pendahuluan

Dalam proses pembangunan, selalu dikaitkan dengan tujuan nyata yang ingin dicapai yaitu bagaimana pembangunan suatu negara, baik itu pembangunan bidang sosial, ekonomi, kualitas sumber daya manusia, politik, budaya dan sebagainya bisa membawa dampak yang signifikan bagi semua pihak, tersebar nya distribusi hasil pembangunan secara merata dan mengurangi kesenjangan di masyarakat. Studi pembangunan konvensional lebih mempertimbangkan pada pertumbuhan dan pemerataan, yakni bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi, fokus pada pendapatan per kapita dan sebagainya. Globalisasi dan kemajuan dalam berbagai bidang yang terjadi di dunia global membuat kesenjangan khususnya ekonomi (pendapatan) semakin terlihat karena akses kepada globalisasi yang tidak dapat dijangkau oleh setiap individu. Kekuasaan, regulasi dan kebijakan ekonomi yang dibuat suatu negara beberapa ada yang secara tidak langsung malah melanggengkan hal tersebut.

Pada umumnya, modernisasi dan kesejahteraan akan selalu disertai sejumlah faktor yang kondusif bagi demokrasi, seperti meningkatnya pendidikan dan pembangunan media massa. Disamping itu, ada hal lain yang

perlu diperhatikan, seperti budaya politik, komitmen elite dan sebagainya. Demokrasi akan lebih substantif jika diikuti adanya kesempatan yang sama diantara warga negara dalam mengakses keputusan-keputusan politik penting. Namun, modernisasi ekonomi yang menempatkan pertumbuhan sebagai ukuran pokok pembangunan ekonomi telah meningkatkan ketimpangan dalam masyarakat (Winarno 2014).

Dengan segala kemajuan ditambah dengan sistem demokrasi yang sudah berjalan, bukan merupakan jaminan suatu negara bisa menghapus kesenjangan dan ketidakmerataan yang sejak lama terjadi. Globalisasi beserta segala kemudahan yang diciptakan seperti kemajuan pengetahuan dan teknologi, akses untuk kehidupan yang *borderless*, hingga kemudahan lainnya, faktanya memang tidak bisa dinikmati oleh semua orang melainkan hanya yang mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk menjangkau hal-hal tersebutlah yang bisa disebut sebagai “penikmat” globalisasi.

Oleh karena itu, di era globalisasi dimana kemajuan bidang ekonomi tak terbendung lagi, demokrasi tidak sepenuhnya mampu mengatasi kesenjangan (*gap*) ekonomi antara dua pihak yang memiliki kapasitas berbeda. Di satu sisi, gagasan demokrasi ekonomi bersama kemudahan pasca

globalisasi tidak dihiraukan oleh satu pihak (biasanya minoritas) untuk semakin menambah kekayaan lewat serangkaian regulasi dan mekanisme menguntungkan yang dirancang oleh pemangku kebijakan, di sisi lain pihak yang lainnya (mayoritas) berada dalam kondisi yang jauh berbeda, terbatasnya akses terhadap keputusan politik dan perkembangan ekonomi membuat kesenjangan semakin lebar, menciptakan ketimpangan antara kelompok kaya (memiliki pendapatan tinggi) dan kelompok miskin.

Kemiskinan dan kesenjangan inilah yang pada akhirnya membuat negara-negara miskin cenderung “mengikhlaskan” tindakan imperialisasi pada negaranya. Tidak adanya banyak pilihan terhadap akses pekerjaan dan pendapatan membuat penduduk di negara miskin pasrah terhadap ekspansi industri asal negara maju untuk memonopoli tenaga (SDM) mereka. Praktek imperialisme sebenarnya sudah sejak lama terjadi di beberapa belahan dunia, praktek ini cenderung melakukan eksploitasi sumber daya alam maupun tenaga oleh negara *big power* terhadap negara miskin. Negara superior melakukan ekspansi “cengkeraman” ekonomi, monopoli dan eksploitasi dalam jangka waktu yang lama dengan sistem tunduk yang wajib ditaati.

Dalam dekade terakhir Perang Dunia, 22 negara berpenghasilan tinggi menyumbang sekitar 15 persen

dari total populasi dunia dan negara-negara tersebut menunjukkan 53 kali GDP per kapita dari sekitar 40 negara berpenghasilan rendah dimana 30 persen populasi dunia berada. Namun, ketimpangan distribusi sumber kekayaan dunia masih terjadi. Negara-negara di Benua Eropa berpenghasilan tinggi mendominasi sebagian besar persentase kekayaan dunia (Dunaway & Clelland 2017).

Salah satu negara yang mengalami ketergantungan dan kemiskinan kompleks adalah Bangladesh. Bangladesh merupakan eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Pelaku ritel fashion dunia membidik Bangladesh karena termasuk wilayah produksi dengan tenaga kerja yang murah dan tingkat pengawasan serta keselamatan yang rendah. Bangladesh adalah satu dari banyak negara miskin dan terpinggirkan yang memberikan akses kepada perusahaan asal negara Barat untuk memanfaatkan *raw materials* dan tenaga kerja mereka demi berputarnya roda perekonomian. Melansir dari The Platform (2013), Bangladesh adalah negara kecil dengan jumlah populasi yang besar, lahan yang ada jumlahnya terbatas untuk dibagikan pada para pekerja. Di saat yang sama, tidak mudah membangun industri yang dapat mengakomodir para pengangguran. Bagaimanapun juga, perekonomian harus terus dibangun, banyak industri kecil dan sektor yang harus terus berjalan. Para ahli berpendapat,

selama ekonomi bergantung pada para Imperialis, sangat sedikit harapan yang bisa diberi untuk kesejahteraan dan kemakmuran para pekerja di negara berkembang.

Metode

Tulisan ini menganalisa tentang kondisi tenaga kerja industri garmen di Bangladesh di periode waktu 2014 (pasca tragedi Rana Plaza) hingga 2020 dalam kerangka *Modern World System*. Sistem pembagian ini menempatkan Bangladesh sebagai negara *periphery* dan menjadi pembahasan yang menarik ketika hal tersebut dielaborasi dengan kondisi “ketergantungan” yang dialami Bangladesh kepada perusahaan fashion dunia sekaligus menilai upaya-upaya pembangunan yang coba dijalankan Bangladesh. Dalam studi pembangunan, dikenal pembahasan mengenai Teori Ketergantungan yang mana setelah berkembangnya pemikiran tersebut, muncullah Teori baru tentang Sistem Pembagian Dunia (*Modern World System*). Pada tulisan ini menyajikan penjelasan mengenai eksploitasi negara *core* kepada *periphery* pada sektor tenaga kerja di Bangladesh dan menyebutnya sebagai Imperialisme gaya baru melihat dari apa yang dilakukan oleh konsorsium industri garmen Eropa & AS kepada buruh garmen di Bangladesh.

Ekonomi Politik Pembangunan dan Imperialisasi Tenaga Kerja di Negara Berkembang

Pendekatan ekonomi politik secara definitif dimaknai sebagai interrelasi diantara aspek, proses dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi dan sebagainya) (Caporaso & Levine 1992). Mengacu pada definisi tersebut, pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi. Artinya, instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar (*market mechanism*), harga, dan investasi dianalisis menggunakan setting sistem politik dimana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan (*a way of acting*), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut (*a place to act*). Pengertian ini sekaligus mengakhiri keyakinan yang salah, yang menyatakan bahwa pendekatan ekonomi politik berupaya untuk mencampur analisis ekonomi dan politik untuk mengkaji suatu persoalan, padahal antara analisis ekonomi dan politik tidak bisa dicampur adukan karena keduanya dalam banyak hal memiliki dasar yang berbeda (Yustika 2009).

Sistem ekonomi Kapitalis menjadi salah satu teori yang dipelajari dalam diskursus ekonomi politik. *The Wealth of Nations* (1776) yang ditulis oleh Adam Smith menjadi salah satu karya paling banyak dirujuk oleh akademisi ketika mempelajari tentang sistem ekonomi kapitalis. Adam Smith mengemukakan sebuah sistem ekonomi dimana pihak swasta diizinkan memiliki kapital agar dapat keuntungan sebesar mungkin. Jadi, pihak swasta diperbolehkan memaksimalkan potensi-potensi kapital yang mereka miliki untuk menjangkau profit sebanyak-banyaknya. Peran pemerintah minim, harapannya akan muncullah “*fit competition*” yaitu persaingan yang sehat dan tidak ada campur tangan pemerintah namun memungkinkan hanya menguntungkan beberapa pihak swasta atau sebagian golongan saja.

Seperti yang dijelaskan Samir Amin yang dikutip Horvath & Grabowski (1994) bahwa sebenarnya dunia diorganisir dalam satu sistem kapitalis yang seragam. Sistem ini muncul sebagai hasil dari perluasan cara produksi kapitalis sejak abad ke-16. Semua masyarakat adalah bagian dari sistem dunia, tapi tidak setara. Secara khusus, *core* dan *periphery* memainkan peran yang tidak setara dalam sistem melalui proses-proses pertukaran yang tidak ideal. Menurut Stiglitz (2010), ketimpangan ekonomi yang terjadi

berasal dari kekuatan politik dan ekonomi yang tidak dikontrol oleh pemerintah.

Singkatnya, meluasnya kapitalisme di seluruh dunia hingga saat ini, ikut pula melebarkan praktek-praktek kapitalisasi khususnya pada wilayah ataupun negara dengan cadangan sumber daya yang mencukupi. Sumber daya yang menarik para pemilik kapital besar untuk melakukan imperialisasi dan kapitalisasi kepada wilayah yang dirasa mempunyai potensi besar lewat pemanfaatan tenaga kerja maupun *raw materials*-nya. Salah satu bentuknya adalah imperialisasi negara miskin dengan cara mengeksploitasi tenaga kerjanya (SDM) dan memegang peran cukup penting dalam perputaran roda ekonomi rumah tangga maupun ekonomi perusahaan. Linden (2001) menjelaskan tenaga kerja bebas memang salah satu ciri utama Kapitalisme, namun bukan tenaga kerja paksa apalagi bebas di seluruh perusahaan produktif. Tenaga kerja bebas adalah salah satu bentuk kontrol tenaga kerja yang diterapkan di pekerjaan terampil di negara *core*, sedangkan sistem kerja paksa digunakan untuk pekerja di negara *periphery*. Kombinasi dari keduanya adalah inti dari Kapitalisme.

Dependency Theory dan Pembagian Dunia dalam Struktur

Kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di negara-negara berkembang memunculkan isu adanya

ketergantungan yang sengaja diciptakan oleh negara maju kepada negara berkembang ataupun negara miskin agar selalu berada dibawah “kendali” mereka. Dengan kata lain, mekanisme ketergantungan adalah transformasi dari apa yang dulu disebut dengan praktek imperialisasi dan Imperialisme yang didasarkan karena faktor kemiskinan. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Horvath & Grabowski (1994) bahwasanya ekonomi negara-negara Dunia Ketiga dibentuk sebagai respons terhadap kondisi yang ditetapkan oleh negara maju dan dengan demikian pertumbuhan dan pembangunan mereka masih bergantung dan terbelakang.

Dependency theory atau Teori Ketergantungan merupakan evolusi dari pendekatan Strukturalisme (Gilpin 1987 dalam Pradipta 2015). Wallerstein banyak dipengaruhi oleh Marx dalam menjelaskan proses pembangunan, tren populer di negara berkembang dan lain hal. Pada intinya, Teori Ketergantungan berfokus pada bagaimana memahami negara *periphery* dengan melihat interrelasi-nya dengan negara *core* (Wallerstein 1974 dalam Martinez 2001).

Sedangkan *Modern World System* dalam banyak hal merupakan adaptasi lanjutan dari Teori Ketergantungan (*dependency theory*). Wallerstein (1974) menjelaskan bahwa sistem dunia (*world system*) adalah sebuah sistem sosial yang

memiliki batasan, struktur, kelompok anggota, sejumlah aturan legitimasi serta koherensi. *Modern World system* adalah pembagian kerja teritorial multikultural yang mengacu pada kekuatan dan relasi penciptaan kekayaan dunia secara keseluruhan dan pengaruhnya terhadap eksistensi dua wilayah (negara) yang saling bergantung yaitu *core* dan *periphery*. Secara geografis maupun budaya keduanya berbeda, yang satu berfokus pada padat karya (*labor-intensive*) dan yang lainnya pada produksi padat modal (*capital-intensive*) (Goldfrank 2000).

Modern World system merupakan pendekatan politik untuk masalah ekonomi pembangunan di negara Dunia Ketiga yang sengaja diciptakan intelektual dalam mengungkap kebijakan di negara-negara dengan kondisi pembangunan menengah dalam mempertanggung jawabkan ketidakmampuan masyarakatnya mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju (Bhagwati 1977 dalam Chirot & Hall 1982). Teori ini berkembang sebagai serangan terhadap tren Teori Pembangunan yang berkembang di tahun 1950–1960-an untuk memberikan pandangan evolusioner yang berbeda soal visi pembangunan sosial, politik dan ekonomi.

Wallerstein (1974) membagi dunia pada tiga sumbu utama, yaitu negara inti (*core*), negara semi pinggiran (*semi periphery*) dan negara pinggiran (*periphery*). Ketiganya

saling terhubung satu sama lain (*interrelation*) dan saling bergantung satu sama lain (*interdependency*). Pemikiran Wallerstein muncul ketika berkembangnya pendekatan dominan terhadap apa yang disebut sebagai Teori Modernisasi. Tujuannya adalah menciptakan alternatif baru yang berbeda dari konsep Modernisasi sebelumnya. Dengan demikian, ada sebuah paradigma teoretis baru untuk memandu penelitian tentang perkembangan Kapitalisme, Industrialisme dan *Nation State*.

Dalam membagi dunia menjadi 3 (tiga) struktur diatas, *Modern World System* menggunakan struktur politik multinegara (*interstate system*) dan karenanya pembagian kerjanya adalah pembagian kerja internasional. Disini, dunia modern dipandang sebagai sebuah sistem dimana semua bagiannya mempunyai struktur secara fungsional dan memiliki keperluan untuk berhubungan satu sama lain. *Modern World System* tumbuh dan berakar dari perspektif Marxisme tradisional dimana ada hierarki secara internasional melalui kelas-kelas ekonomi, adanya negara maju yang mengeksploitasi negara berkembang sehingga timbul ketimpangan pertumbuhan ekonomi, dominasi dan eksploitasi terhadap negara miskin (Goldfrank 2000).

Menurut Gilpin (1987), argumen dasar bahwasanya ekonomi modern berisi dominasi negara *core* dan *periphery* yang saling

berinteraksi dan berfungsi sebagai sebuah integrasi yang utuh. *Modern world system* melihat integrasi utuh sebagai sebuah mekanisme yang menghasilkan akumulasi kapital dan perkembangan dalam negara *core* yang memanfaatkan ekonomi dan politik negara *periphery* yang lemah/rentan. Hal ini menunjukkan bahwa *core* dan *periphery* tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam kacamata hubungan tertentu (Gilpin 1987 dalam Pradipta 2015). Karena hubungan ekonomi yang bervariasi antara *core*, *periphery* dan *semiphery*, maka kombinasi kontrol tenaga kerja yang berlaku di tiap bidang juga berbeda-beda. Wilayah *core* memiliki ekonomi terintegrasi dengan kegiatan produksi yang padat modal dan tingkat produktivitas tinggi. Sedangkan wilayah *periphery* memiliki ekonomi luar negeri dan pasar domestik relatif lemah dengan produksi yang padat karya yang di dominasi sistem perbudakan dan paksaan. Untuk wilayah *semiphery*, mereka memiliki produksi padat modal dan padat karya dalam kategori cukup (Linden 2001).

Pembagian negara-negara dalam kerangka *Modern World System* menurut Wallerstein dulunya adalah sebagai berikut, zona *core* adalah zona negara-negara maju, dimana modal dan pengetahuan bertemu membentuk pusat dari sistem dunia Kapitalisme. Sedangkan zona *periphery* (pinggiran) adalah zona negara-negara berkembang seperti

Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa Timur. Zona ini merupakan tempat sumber daya dan barang-barang produksi tersedia secara alamiah. Diantara keduanya, terdapat zona *semiphery* (semi pinggiran) yang termasuk didalamnya Italia diawal abad ke-20, Rusia, India, Brazil, China, Korea Selatan, Taiwan dan beberapa lagi (Mudzakkir 2021). Namun, saat ini pembagian zona-zona sudah mulai mengalami pergeseran, merujuk pada Dunaway & Clelland (2017), negara *core* ditempati oleh negara *big power* diantaranya AS, UK, Australia, Austria, Jerman, Kanada, Finlandia, Prancis, Belanda, Norwegia, Jepang, New Zealand, dan sebagian besar negara-negara Eropa lainnya. Sedangkan negara *periphery* yakni India, Filipina, Thailand, Bangladesh, Burkina Faso, Argentina, Bahamas, Botswana, Kamboja, Chile, Colombia, Ethiopia, Kepulauan Fiji, Kiribati, Haiti, Iran, Irak dan beberapa lagi yang di dominasi oleh negara-negara di benua Asia dan sebagian besar negara di Benua Afrika serta negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik.

Pembagian sistem dunia dewasa ini juga didasarkan pada perhitungan *Human Development Index* (HDI), jumlah penduduk total, GDP negara, infrastruktur, tingkat kesejahteraan penduduk dan sebagainya. Mayoritas negara *core* adalah negara-negara industri dimana negara *periphery* maupun *semiphery* bergantung padanya. Negara-negara

pada kategori ini memiliki kesiapan alat militer dan kekuatan untuk menguasai dunia dan mengontrol *global market*. Mayoritas penduduknya sudah *well-educated* dan sejahtera. Negara-negara *core* memiliki kepastian kekuatan dengan dukungan yang ideal dari segi ekonomi, politik, militer dan teknologi sehingga mereka sepenuhnya mandiri dan tidak butuh suntikan dana luar negeri lagi. Sedangkan negara *periphery* adalah negara yang biasanya menerima bentuk eksploitasi dan kapitalisasi dari negara-negara *core* entah pada sektor ekonomi, tenaga kerja dan *raw materials*. Kebalikan dari *core*, negara-negara *periphery* secara ekonomi, masih dalam taraf membutuhkan suntikan bantuan luar negeri untuk memenuhi infrastruktur publik, dan umumnya juga menghadapi masalah perlindungan kesehatan. Bahkan dalam soal politik, beberapa negara *periphery* tidak punya pemerintahan yang kuat hingga di kontrol oleh negara lain. *Periphery* biasanya memiliki komposisi penduduk *well-educated* lebih sedikit dibanding yang belum berpendidikan tinggi, maka dari itu tenaga kerjanya masih di dominasi oleh *low-skill labor*. Negara-negara ini memiliki *international investment* yang terbatas dan bergantung soal modal dan *ekspor raw materials* pada negara *core* (Dunaway & Clelland 2017).

Gagalnya Pembangunan dan Ketergantungan Bangladesh dalam Kerangka Modern World System

Kerja paksa dan perdagangan manusia untuk eksploitasi tenaga kerja sudah lama meluas di Bangladesh, baik di dalam negeri maupun lintas perbatasan menuju India, Pakistan, Lebanon, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, dan Sudan (Accountability Hub Organisation 2017). Sejumlah besar usia siap kerja utamanya laki-laki, direkrut untuk bekerja diluar negeri melalui janji kerja palsu lantas mengalami kondisi kerja yang eksploitatif (kerja paksa).

Kerangka *Modern World System* menempatkan Bangladesh sebagai negara *periphery* yang terus bisa dianggap sebagai “ladang hijau” pekerja murah oleh negara *core*. Pertumbuhan ekonomi yang dialami Bangladesh di tahun 1980-an tidak dibarengi dengan peningkatan yang serupa di bidang perlindungan hak-hak tenaga kerja. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja tetapi dengan upah yang rendah dan kondisi kerja yang berbahaya. Eksploitasi kepada para pekerja terjadi dalam berbagai bentuk di Bangladesh, mulai dari upah rendah, jam kerja yang berlebihan, kondisi kerja yang kejam hingga pelecehan fisik dan verbal. Eksploitasi tenaga kerja ditemukan di industri garmen, produksi batu bara, industri perikanan dan beberapa

industri lain (Accountability Hub Organisation 2017).

Negara-negara *Periphery* pada umumnya tergolong memiliki HDI yang rendah, yang diukur dari angka harapan hidup, pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan sebagainya. Indeks ini mengelompokkan negara dengan peringkat skala 0 hingga 1.0 dimana 1.0 adalah pembangunan manusia tertinggi. Penjelarasannya, pembangunan manusia tertinggi ada pada skala (0.8 – 1.0), pembangunan manusia tinggi ada pada skala (0.7 – 0.79) dan pembangunan manusia medium/sedang pada skala (0.55 – 0.70), sedangkan pembangunan manusia rendah (dibawah 0.55). Menurut data, sekitar setengah dari kelompok negara *periphery* berada pada tingkatan pembangunan manusia sedang dan rendah. Di tahun 2019, Bangladesh memiliki angka skor HDI sebesar 0.632 (yang diklaim meningkat 60 persen dibanding tahun 1990) dengan jumlah penduduk sekitar 168 juta lebih. Tahun 2020, dengan skor HDI yang dimiliki, UNDP menempatkan Bangladesh berada pada peringkat 133 dari total 189 negara di dunia (UNDP 2020) & (DD National News 2020).

Bangladesh memiliki GDP per kapita kurang lebih sebesar US\$1,521 di tahun 2017 (Focus Economics 2020), kondisi hampir serupa dengan negara-negara *periphery* lain di Asia yang memiliki angka GDP per kapita tidak beda jauh seperti Bhutan, Kamboja, Myanmar, Nepal, Pakistan,

Srilanka, Vietnam dan Timor Leste (Dunaway & Clelland 2017). Sementara masih sangat jauh jika dibandingkan GDP per kapita kelompok negara *core* seperti Australia, Belgia, Austria, UK, AS, Jerman dan lainnya. Di tahun 2019, GDP per kapita Bangladesh meningkat menjadi US\$1,829 dengan *poverty rate* sebesar 24,3 persen (Focus Economics 2020).

Merujuk pada Laporan UNDP (2020), Bangladesh mengalami kemajuan dalam indeks pembangunan manusia dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, Bangladesh menempati urutan ke 136 diantara 189 negara dengan skor HDI 0.608, menempatkannya diantara negara yang dianggap telah mencapai pembangunan manusia menengah. Namun faktanya, meski Bangladesh telah mengambil langkah-langkah menuju pengentasan kemiskinan, banyak tantangan yang masih harus dihadapi. Hingga tahun 2016, hampir seperempat penduduknya (sekitar 24,3 persen) masih hidup dalam garis kemiskinan. Ancaman dan guncangan yang terus menerus terhadap kondisi alam, politik dan ekonomi serta dampak globalisasi yang tidak pasti apalagi lingkungan perdagangan internasional yang semakin kompetitif menghambat upaya pembangunan Bangladesh. Bangladesh juga masih mengalami tantangan soal tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia. Perdana Menteri Sheikh Hasina berkomitmen untuk mengakhiri

pernikahan anak perempuan dibawah 15 tahun pada 2021, namun hanya ada sedikit kemajuan dari upaya ini selama beberapa tahun. Tindakan serupa masih diperbolehkan dengan klausul khusus seperti jika ada izin orang tua atau keputusan pengadilan (Human Rights Watch 2020).

Masalah migrasi penduduk juga masih dihadapi oleh Bangladesh, perubahan struktur dan perpindahan penduduk pedesaan mendorong juga migrasi ekonomi yang cepat. Hal ini memperburuk kemiskinan di perkotaan, berkolaborasi dengan sedikitnya pekerjaan hingga persoalan kemacetan dan tempat tinggal di perkotaan yang terbatas. Laju kemiskinan perkotaan memang mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, namun menurun hanya sebesar 2,4 poin (dari 21,3 menjadi 18,9 persen). Oleh karena itu, Bangladesh masih menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan dan mengembangkan pencapaian-pencapaian untuk memenuhi tuntutan pembangunan dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) (UNDP Report 2020).

Sejatinya, menilik dari usaha pembangunan Bangladesh, sedikit bisa disimpulkan bahwa perbaikan yang dilakukan sejak tahun 2000, tidak dapat dijadikan tolak ukur tercapainya perbaikan taraf hidup masyarakat menyeluruh (IBRD Report 2019). Meskipun IBRD (2019) dalam laporannya menyebut

Bangladesh telah berhasil mengurangi setengah populasi kemiskinan dan mengangkat 25 juta orang keluar dari kemiskinan, namun World Bank (2020) dalam laporannya menyebut bahwa kemiskinan di Bangladesh turun dari awalnya sebesar 43,8 persen di tahun 1991 menjadi hanya sebesar 14,8 persen di tahun 2016 tetapi masih sekitar 39 juta orang penduduknya berada dibawah garis kemiskinan.

Berangkat dari hal diatas, gagalnya upaya pembangunan khususnya kesejahteraan dan pembangunan sosial di Bangladesh bisa dijelaskan lewat kenyataan sebagai berikut diantaranya, negara gagal memberi perlindungan kepada perempuan dibawah umur untuk terhindar dari praktek pernikahan dini. Negara juga gagal mencapai stabilitas politik yang kondusif dibuktikan masih seringnya tindakan demonstrasi dan pergolakan nasional. Bangladesh juga gagal melaksanakan perbaikan taraf hidup yang menyeluruh terhadap penduduk, buktinya masih banyak buruh pada industri garmen yang memilih untuk “bertahan” dalam skema imperialisasi dan eksploitasi perusahaan dunia Barat yang bersekongkol dengan pemilik industri lokal meskipun mengalami berbagai kekerasan dan tanpa adanya perlindungan demi biaya hidup. Bahkan World Bank (2020) menyebutkan, Bangladesh sebenarnya telah menerima skema bantuan luar negeri dari Bank Dunia

hampir seperempat besarnya dari semua dana bantuan luar negeri yang masuk kepadanya. Bank Dunia sebenarnya telah mendukung penuh semua upaya pemerintah Bangladesh dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, penanggulangan bencana, pembangunan SDM dan sosial serta pengentasan kemiskinan. Namun, nyatanya Bangladesh masih menghadapi persoalan pelik soal perbaikan kesejahteraan penduduknya bahkan minimnya angka penduduk yang menamatkan pendidikan dasar dan kualitas pendidikan di semua jenjang masih menjadi masalah pelik yang belum tertuntaskan.

Imperialisme Gaya Baru pada Buruh Industri Garmen di Bangladesh

Industri garmen atau *ready-made garments* (RMG) di Bangladesh menyumbang hampir 83 persen dari pendapatan ekspor dan lebih dari 10 persen bagi GDP. Industri ini mempekerjakan sekitar 4 (empat) juta penduduk yang di dominasi perempuan yang tersebar di lebih dari 4.500 pabrik (data yang berbeda dirilis oleh Quartz Media pada 2015 yang menyebutkan bahwa jumlah pabrik yang sebenarnya berjumlah 7.179). Banyak perusahaan fashion global *high-end* Barat yang memproduksi pakaian di Bangladesh yang tergabung dalam 2 (dua) Konsorsium besar, yakni Konsorsium Eropa yang menaungi perusahaan fashion kelas dunia yang terdiri dari

Inditex, H&M, Tesco, dan sebagainya. Sedangkan Konsorsium Amerika Serikat beranggotakan diantaranya Walmart, GAP, Disney, JC Penney dan masih banyak lagi (Reuters 2020). Secara teknis, hanya sekitar 3.200 pabrik yang terdaftar sebagai eksportir langsung artinya mereka terdaftar untuk memasok label internasional secara langsung (Quartz Media 2015).

Ironisnya, proses industrialisasi dan jumlah yang besar ini tidak didasari oleh perlindungan dan hak yang layak bagi para buruh garmen, bahkan buruh di Bangladesh masuk kategori penerima bayaran paling rendah di dunia. Hal ini kontradiksi dengan keuntungan yang diterima para imperialis pemilik industri fashion kelas dunia, mereka membeli pakaian jadi dari pemilik pabrik garmen yang relatif murah dan kemudian pabrik memberikan upah kepada buruh dalam jumlah yang miris. Para buruh garmen berpenghasilan kurang dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah setempat sebesar \$75 per bulan, sangat jauh dibawah biaya hidup yang berkisar \$188 per bulan (Human Rights Pulse 2020). Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2010 dimana upah buruh hanya sejumlah \$38 per bulan, dengan pendapatan sebesar ini seseorang hampir tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Sebagian besar gaji buruh diberikan pada tuan tanah, para buruh diharuskan bekerja lembur

sedikitnya 2 (dua) jam hingga sepuluh jam. Jika buruh melakukannya, mereka mendapat tambahan sedikit penghasilan untuk bertahan hidup dan memberikan pada keluarganya di pedesaan (The Platform 2013).

Wallerstein (1996 dalam Linden 2001) mengemukakan bahwa kondisi masyarakat proletariat seringkali menyerahkan sebagian nilai yang mereka ciptakan untuk orang lain (dalam hal ini kaum borjuis). Kontrol tenaga kerja dalam *modern world system* yang disebut dengan perbudakan dimana individu-individu melakukan kewajiban kerja pada satu orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan inilah yang sedang dihadapi oleh Bangladesh saat ini, di satu sisi, ekonomi nasional yang ditopang oleh industri garmen yang bergantung pada perusahaan fashion dunia Barat perlu terus dilakukan, namun di sisi yang lain, tekanan dari pihak luar untuk memperhatikan kondisi pekerja garmen dan fakta kesejahteraan para pekerja menjadi persoalan yang pelik.

Persoalan upah bukan satu-satunya bentuk eksploitasi terhadap buruh, hak pekerja untuk membentuk serikat guna mengatasi adanya pelanggaran, berlandung dari segala bentuk ancaman, intimidasi dan serangan fisik tidak didapatkan. Buruh industri garmen Bangladesh mengalami ancaman, intimidasi bahkan pelecehan fisik dan seksual (Reuters 2020). Manajemen pabrik yang menaungi mereka tidak

memberikan akses terhadap hal-hal tersebut. Aktivis dan media hak asasi manusia Human Rights Pulse (2020) merilis bahwa upaya untuk menegakkan undang-undang ketenagakerjaan dan mengakhiri penganiayaan terhadap serikat pekerja sudah dimulai sejak tahun 2015, dua tahun setelah tragedi runtuhnya Rana Plaza di Dhaka sebagai kawasan industri terbesar di Bangladesh namun hingga saat ini belum ada titik terang mengenai upaya perlindungan tersebut. Human Rights Watch (2020) menerbitkan laporan bahwa buruh paling menderita di dunia adalah buruh pabrik garmen di Bangladesh. Laporan ini didasarkan wawancara kepada lebih dari 160 buruh dari 44 pabrik berbeda yang menyimpulkan bagaimana undang-undang ketenagakerjaan masih belum hadir untuk memberikan perlindungan yang memadai.

Di tanggal 24 April 2013, dunia menyaksikan bencana industri terburuk sepanjang sejarah ketika gedung Rana Plaza runtuh dan menewaskan 1.134 buruh dan ratusan lainnya luka-luka. Tragedi Rana Plaza membawa perhatian global pada realitas eksploitasi buruh dan pengabaian masalah keselamatan kerja sektor garmen di Bangladesh. Kejadian ini bukan pertama kali di Bangladesh, sebelumnya tragedi kebakaran di Tazreen Fashions, salah satu pabrik garmen, menewaskan lebih dari 700 buruh sepanjang tahun 2005 sampai 2012 (Accountability

Hub Organisation 2017). Tekanan semakin datang dari dunia internasional pasca tragedi Rana Plaza, pemerintah Bangladesh dengan didukung dari ILO, mengadopsi *National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the Garment Sector* (NTPA) pada tahun 2013. Rencana ini mempertemukan para aktor pemerintah, para pekerja dan pengusaha untuk membentuk kerangka kerja utama meningkatkan kondisi kerja aman di industri garmen Bangladesh. Dua inisiatif lain dari sektor swasta juga telah dikembangkan dalam upaya mencegah bencana di industri garmen yakni *Alliance for Bangladesh Worker Safety* dan *Accord on Fire and Building Safety*. Tujuan dari kedua inisiatif ini untuk mengatur masalah keselamatan di industri garmen melalui inspeksi pabrik, pelaporan, pelatihan dan pemberdayaan para pekerja serta menyediakan dana untuk perbaikan pabrik (Accountability Hub Organisation 2017).

Dalam laporan yang dirilis oleh NYU Stern Center for Business and Human Rights dan diterbitkan oleh Quartz Media (2015), sampai tahun 2015, sekitar 27 persen saja pabrik garmen di Bangladesh yang menerima perhatian dari *Alliance for Bangladesh Worker Safety* sementara sisanya masih belum tersentuh. Dari sekitar 3.500 hingga 4.500 pabrik yang dilaporkan, hanya sekitar 1.900

berada dibawah pengawasan aliansi. Sementara itu, Quartz Media (2015) menemukan data baru pada jumlah pabrik garmen di Bangladesh yang mencapai 7.179 pabrik. Pabrik-pabrik yang tidak terhitung sebelumnya inilah sebagian besar bersifat informal dan tidak mempunyai aturan tetap, dan berarti menjadikannya berbahaya. Seringkali, pabrik-pabrik ini menerima ketidakpastian karena statusnya masih sub-kontraktor, yang mana sebuah perusahaan merek tertentu dapat sewaktu-waktu menghapus permintaan karena langsung mendapat dari pemasok utama ataupun karena memberikan permintaan tersebut ke pabrik yang lain. Disinilah buruh juga dirugikan dari sistem tersebut, jutaan buruh di pabrik sub-kontrak berada diluar perlindungan aliansi dan rentan terhadap kondisi tempat kerja yang tidak aman.

UU ketenagakerjaan Bangladesh tahun 2006 mengatur bagaimana seharusnya upah minimum diberikan, usia minimum kerja, kompensasi, jam kerja, jaminan kesehatan dan keselamatan. Ketentuan ini diperbarui setelah terjadinya tragedi Rana Plaza yang menyempurnakan pasal sebelumnya dengan menambahkan sejumlah 192 pengawas baru sehingga hingga tahun 2016, data menyimpulkan total terdapat 276 pengawas ketenagakerjaan di Bangladesh (Accountability Hub Organisation 2017). Pemerintah Bangladesh

sebenarnya telah meratifikasi konvensi 87 dan 98 International Labour Organization (ILO) tentang kebebasan berserikat dan melakukan perundingan, namun hingga tahun 2020, UU ketenagakerjaan nyatanya tidak bisa mematuhi standar-standar tersebut. Pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya untuk memastikan perlindungan bagi para buruh dan menuntut pelaku industri untuk menghormati hak-hak buruh, namun perusahaan yang membeli produk dari pabrik di Bangladesh lebih mementingkan hasil dan kelancaran rantai pasokan (Human Rights Pulse 2020).

Praktek semacam inilah yang terjadi di masa modern banyak disebut para ahli sebagai imperialisme gaya baru. Imperialisme disebut sebagai tahap monopoli dari Kapitalisme. Sebagaimana yang dijelaskan Schumpeter (dalam O'Hanlon 2013), Imperialisme adalah sisa-sisa feodalistik struktur sosial dalam Kapitalisme dimana penguasa negara tunduk pada Kapitalis yang didorong oleh keinginan untuk kejayaan (*glory*). Bahwa negara *big power* berusaha menanamkan pengaruhnya kepada negara *periphery* yang berada dalam kondisi rentan seperti Bangladesh. Hal ini diperparah dengan pemilik pabrik yang tidak pro terhadap buruh. Tenaga kerja di negara *periphery* tidak kuasa menolak atau menghapus mekanisme yang berjalan karena perekonomian mereka bergantung pada kelangsungan

industri garmen. Melansir The Platform (2013), apa yang terjadi di Bangladesh adalah kombinasi dari para kelas penguasa, Imperialis dan pemilik garmen bersama-sama menyebarkan agenda bahwa industri garmen menyelamatkan ekonomi dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan terutama bagi wanita. Dengan banyaknya pekerja garmen perempuan maka menempatkan perempuan pada alternatif peluang kerja yang terbatas.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Labowitz & Baumann-Pauly (dalam Quartz Media 2015) terkait dengan apa yang dihadapi Bangladesh, bahwa untuk memperbaiki masalah industri garmen entah masalah pabrik maupun perlindungan buruh adalah dengan menjadikannya sebagai “tanggung jawab bersama”, dimana semua pihak (perusahaan, pemilik pabrik, pekerja) mengakui ruang lingkup masalah dan memberikan ruang untuk diskusi yang jujur dan bertindak bersama-sama untuk memperbaikinya. Bagaimanapun industri garmen telah membantu jutaan penduduk Bangladesh untuk bergantung hidup dan bukan jalan terbaik jika berbagai merek fashion dunia keluar dari Bangladesh.

Kesimpulan

Terdapat dua pembagian dunia dalam kerangka *modern world system*

yaitu, negara *core* (inti) dan negara *periphery* (pinggiran). Negara *core* adalah negara maju pemilik kapital besar dan kesejahteraan yang stabil sedangkan sebaliknya, negara *periphery* adalah negara berkembang yang seringkali hanya mempunyai sumber daya mentah (*raw materials*) dan tenaga kerja (berkualifikasi rendah) yang melimpah. Ada sebagian pendapat yang meyakini bahwa negara-negara miskin memang dipertahankan untuk tetap miskin dan bergantung agar struktur atau pola ini tetap berjalan. Negara miskin ekonomi-nya tetap dibuat “*vulnerable*” atau sensitif/rentan karena mekanisme yang sudah diatur bersama oleh negara maju sebagai *world market system*. Salah satu mekanisme “perbudakan” masa kini dimana tenaga kerja yang dimiliki oleh Bangladesh di eksploitasi oleh para Imperialis konsorsium AS dan Eropa untuk tujuan keuntungan *big power* sang pemilik kapital besar. Dominasi inilah yang dinamai sebagai “*poverty cycle*”, dimana negara maju terus mempertahankan pembagian kelas kelompok kaya dan kelompok miskin dan mekanisme ketergantungan didalamnya. Pada akhirnya, negara *periphery* tidak bisa maksimal dalam upaya-upaya menjalankan proses pembangunan ke arah lebih maju.

Referensi

E-Book dan Jurnal

- Chiot, Daniel & Thomas D. Hall, 1982. "World system theory". *Annual Reviews Inc* (8): 81-106.
- Dunaway, Wilma A. & Donald A. Clelland, 2017. "Moving towards theory for the 21st century: the centrality of nonwestern semiperipheries to world ethnic/racial inequality". *Journal of World-Systems Research* 23 (2): ISSN: 1076-156X.
- Goldfrank, Walter L, 2000. "Paradigm Regained? The Rules of Wallerstein's World System Method". *Journal of World-Systems Research* 6 (2): 150-195.
- Horvath, Julius & Richard Grabowski, 1996. *Core and periphery in the world economy: an empirical assesment of the dependence of third world growth on the developed countries*. Articles. Department of Economics, Southern Illinois University.
- Linden, Marcel Van Der, 2001. "Global labor history and the modern world system". *International Review of Social History* 46 (2001): 423-459.
- Pradipta, Christian Aditya, 2015. "Words take the world: Eksploitasi AS terhadap indonesia sebagai negara periphery pada era digital 2014". *Global & Policy* 3 (2): 101-111.
- Stiglitz, Joseph E., 2010. *Reforming the international monetary and financial systems in the wake of the global crisis*. New York: The New Press.
- Wallerstein, Immanuel. 1974. *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York: Academic Press.
- Winarno, Budi, 2014. *Dinamika isu-isu global kontemporer*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).
- Yustika, Ahmad Erani, 2009. *Ekonomi Politik: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ### Laporan Tahunan
- Accountability Hub Organisation, 2017. *Labor Exploitation: Bangladesh*.
- Human Rights Watch, 2020. *Bangladesh Report*.
- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 2019. *Bangladesh Poverty Assesment: Facing old and new frontiers in poverty reduction*.
- United Nations Development Programme (UNDP), 2020. *Bangladesh Report*.
- United Nations Development Programme (UNDP), 2020.

*Human Development Reports:
Human Development Indicators
of Bangladesh.*

Laporan Penelitian

O'Hanlon, Carmella, 2013. *An analysis of the relationship between capitalism and imperialism through adam's the wealth of nations*. College of the Holy Cross.

Makalah Seminar

Martinez, Carlos A., 2001. "World Systems Theory". This paper has been presented in the Research Conference in Engineering Systems. Cambridge.

Artikel Media Massa

Mudzakir, Amin, 2021. "Globalisasi dan Sistem Dunia Immanuel Wallerstein". dalam *Media Center for Area Studies Indonesian Institute of Science (Pusat Penelitian Kewilayahan LIPI)*. 21 Januari 2021.

Website dan Media Elektronik

DD National News India, 2020. *Bangladesh move 2 steps up on Human Development Index (HDI)*, (online) melalui <https://ddnews.gov.in/international/bangladesh-moves-2-steps-human-development-index-hdi> (diakses pada 18 Februari 2021).

Focus Economics, 2020. *Bangladesh*

Economic Outlook, (online) melalui <https://www.focuseconomics.com/countries/bangladesh#:~:text=Bangladesh%20Economic%20Growth&text=FocusEconomics%20panelists%20project%20GDP%20to,and%207.1%25%20in%20FY%202022> (diakses pada 18 Februari 2021).

Human Rights Pulse, 2020. *Covid-19 exacerbates exploitation in the bangladeshi garment industry*, (online) melalui <https://www.humanrightspulse.com/covid-19-exacerbates-exploitation-in-the-bangladeshi-garment-industry> (diakses pada 12 Februari 2021).

Quartz Media, 2015. *The Problem in Bangladesh's garment industry is three times bigger than anyone suspected*, (online) melalui <https://qz.com/577024/the-problem-in-bangladeshs-garment-industry-is-three-times-bigger-than-anyone-suspected/> (diakses pada 14 Februari 2021).

The Guardian, 2013. *Bangladesh's garment workers face exploitation, but is it slavery?*, (online) melalui <https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/may/16/bangladesh-garment-workers->

- [exploitation-slavery](#) (diakses pada 12 Februari 2021).
- The Platform, 2013. *Bangladesh garments industry and the imperialist agenda*, (online) melalui <http://www.the-platform.org.uk/2013/12/06/bangladesh-garments-industry-and-the-imperialist-agenda/> (diakses pada 14 Februari 2021).
- Thomson Reuters, 2020. *Bangladesh urged to stop worker abuse in garment industry*, (online) melalui <https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-worker-rights/us-bangladesh-worker-rights-idUSKBN20W25O> (diakses pada 12 Februari 2021).
- World Bank, 2020. *The World Bank in Bangladesh: an overview*, (online) melalui <https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/overview> (diakses pada 18 Februari 2021).